

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI IV DPR RI  
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,  
KELAUTAN DAN PERIKANAN, SERTA PANGAN)**

---

- Tahun Sidang : 2017-2018  
Masa Persidangan : III  
Rapat Ke- : 10  
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Jenderal Planologi dan Tata Lingkungan, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Tim Terpadu Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dalam Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP)
- Sifat Rapat : Terbuka  
Hari/Tanggal : Selasa, 23 Januari 2018  
Waktu : 10.00 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)  
Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta
- Acara : Membahas Rencana Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dalam Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP)
- Ketua Rapat : Viva Yoga Mauladi, M.Si.  
Sekretaris Rapat : Drs. Budi Kuntaryo  
Hadir : A. 32 Anggota dari 52 Anggota Komisi IV DPR RI  
B. Hadir Undangan:  
1. Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com., M.P.M. (Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan);  
2. Ir. Yuyu Rahayu, M.Sc. (Sekretaris Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan);  
3. Prof. Dr. Tukirin Patomihardjo (Tim Terpadu Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dalam Revisi RTRWP); dan  
4. Ir. Suhardjono (Tim Terpadu Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dalam Revisi RTRWP)  
beserta jajarannya

## **I. PENDAHULUAN**

Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan Direktur Jenderal Planologi dan Tata Lingkungan, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Tim Terpadu Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dalam Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dalam rangka membahas Rencana Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dalam Revisi RTRWP, pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018, dibuka pukul 11.00 WIB oleh Ketua Rapat Viva Yoga Mauladi, M.Si. dan dinyatakan terbuka untuk umum.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. Komisi IV DPR RI akan melakukan kunjungan lapangan ke Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memberikan data-data secara detail terkait lokasi Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan yang masuk dalam kriteria yang berdampak penting dan cakupan luas serta bernilai strategis (DPCLS) dalam usulan Revisi RTRWP dimaksud.
2. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan data kasus pelanggaran penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang sedang dan telah diproses di Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk membentuk tim teknis terkait verifikasi ulang terhadap hasil kajian Tim Terpadu dalam usulan perubahan peruntukan dan alih fungsi kawasan hutan dalam revisi RTRWP untuk kemudian hasilnya disampaikan kepada Komisi IV DPR RI.

## III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.25 WIB.

Komisi IV DPR RI  
Ketua Rapat,

Ttd.

**Viva Yoga Mauladi, M.Si.**  
**A-493**

Direktur Jenderal Penegakan Hukum  
Lingkungan Hidup dan Kehutanan,

Ttd.

**Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com., M.P.M.**

Sekretaris Direktur Jenderal  
Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan,

Ttd.

**Ir. Yuyu Rahayu, M.Sc.**

